

**ARAHAN**  
**SEKRETARIS JENDERAL**  
**PADA FORUM KOMUNIKASI KEHUMASAN 2019**  
**Jakarta, 21 Mei 2019**

---

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Yang saya hormati,

- **Ketua Komisi Informasi Pusat - Bapak Gede Narayana;**
- **Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika - Bapak Drs. Selamatta Sembiring, M.Si.;**
- **Pejabat Eselon II Lingkup KKP;**
- **Pejabat Kehumasan Pusat dan UPT lingkup KKP;**
- **Para Agen Perubahan lingkup KKP.**

1. Fenomena revolusi industri 4.0 dan keterbukaan informasi publik di era digital saat ini menjadi tantangan sekaligus dorongan bagi kita untuk berbenah, menggunakan kekuatan teknologi dan meningkatkan kapasitas diri dengan keahlian yang lebih kompleks guna meningkatkan profesionalitas kerja ke depan.
2. Hal ini menjadi fokus utama kehumasan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Para pejabat dan pengelola kehumasan, harus mampu melihat peluang perkembangan industri digital dan menyusunnya menjadi program dan kegiatan strategis. Tanpa komunikasi yang baik dan hubungan yang harmonis, iklim hubungan institusi dengan publik juga tidak dapat dibentuk. Oleh karena itu, kita semua memegang peran strategis sebagai generasi Humas 4.0.
3. Keterbukaan informasi saat ini juga sangat diperlukan, terutama dalam pemerintahan. Dalam rangka menunjang keberhasilan kinerja pemerintahan, menyerap aspirasi publik, dan mempercepat penyampaian informasi mengenai kebijakan dan program pemerintahan, Presiden Joko Widodo telah menerbitkan Inpres Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik;
4. Sejalan dengan Inpres tersebut, fungsi humas KKP harus mampu mensosialisasikan kebijakan, memberikan pelayanan, menyebarkan pesan atau informasi serta mengedukasi masyarakat mengenai kebijakan hingga program-program kerja KKP kepada masyarakat.
5. **Kegiatan kehumasan di KKP ini harus dijadikan *top priority*, karena berbagai program dan upaya yang dilakukan tidak akan dapat tersampaikan dengan baik atau berhasil jika humas tidak mampu mengomunikasikannya dengan baik. Para pejabat KKP mulai sekarang harus bisa mengutamakan hal-hal yang terkait kegiatan kehumasan seperti**

**publikasi atau menyertakan strategi kehumasan dalam setiap lini komunikasi kebijakan. Jika diperlukan program dan kegiatan kehumasan dimasukkan ke dalam Indikator Kinerja Utama masing-masing unit kerja.**

6. Dalam pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diantara K/L tahun 2018 lalu, KKP mendapat kategori **cukup informatif**. Tahun ini diharapkan dapat meningkat menjadi kategori **Informatif**. Untuk itu, kita harus berkerja lebih keras lagi untuk mewujudkannya.
7. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian kita semua terkait peningkatan Keterbukaan Informasi Publik, antara lain :

- a. pengembangan dan pengelolaan aplikasi website PPID harus dilakukan dengan baik.

**Setiap unit kerja lingkup KKP, khususnya unit kerja eselon I diharapkan agar selalu mengupload data/informasi publik yang tersedia di masing-masing unit kerjanya.**

- b. mengumumkan informasi kepada publik secara periodik,
- c. pelayanan informasi yang prima,
- d. penyediaan dan pemutakhiran informasi, hingga
- e. melakukan uji konsekuensi secara periodik.

**Setiap unit kerja lingkup KKP dihimbau agar melaksanakan Uji Konsekuensi terhadap Data/Informasi Publik yang perlu dibuka ke publik atau untuk dikecualikan.**

8. Perlu kami sampaikan bahwa, jumlah permohonan informasi publik pada tahun 2018 di KKP, adalah
  - a. Pemohon informasi berjumlah 33 pemohon
  - b. Jumlah informasi publik yang diminta/dimohonkan sebanyak 68
  - c. Dipenuhi sebanyak 64
  - d. Ditolak sebanyak 4 jenis informasi (dikarenakan informasi tersebut tidak dalam penguasaan KKP, dan pertimbangan masih dalam proses pengolahan (contoh laporan keuangan).
  - e. Waktu yang dibutuhkan dalam memenuhi permintaan 1 informasi adalah 3.9 hari kerja per informasi.

**Jumlah pemohon informasi ini dari tahun ke tahun cenderung menurun, dan ini menunjukkan bahwa Data/Informasi Publik yang tersedia di Website PPID sudah dapat menjawab atau memberikan informasi yang dibutuhkan. Untuk itu, diharapkan masing-masing unit kerja eselon I agar secara rutin dan priodik selalu memperbaharui Data/Informasi Publik nya.**

9. **Saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Ketua Komisioner KIP Bapak Gede Narayana. Semoga kehadiran beliau dapat memberikan pencerahan sekaligus asistensi kepada kita semua sebagai pelaksana layanan informasi publik KKP sehingga dapat mendongkrak peringkat KIP kita tahun ini.**
10. Guna akselerasi pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, KKP sudah memperbaharui Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik yakni Permen KP 4/2019 yang sebelumnya hanya dalam bentuk kepmen (KepMenKP 35/2014). Hal ini menunjukkan bahwa KKP memang sangat concern terkait layanan informasi publik.
11. **Dengan diterbitkannya Permen-KP Nomor 4 tahun 2019 tersebut, mengamanatkan setiap unit kerja eselon I dapat segera menindaklanjuti dengan membentuk kelembagaan PPID di masing-masing unit kerja nya.** Terkait hal itu, saat ini tengah dilakukan penyusunan penetapan untuk kelembagaannya dalam bentuk Kepmen.
12. Upaya peningkatan juga dilakukan untuk PPID, diantaranya melalui beberapa strategi :
  - a. Semua pemohon informasi diarahkan melalui aplikasi digital melalui website PPID <http://ppid.kkp.go.id/>
  - b. Pengembangan system interkoneksi dengan seluruh PPID Unit Kerja Eselon I dan UPT di lingkungan KKP.
  - c. Pengembangan aplikasi PPID berbasis android pada TA.2019 guna meningkatkan kecepatan pelayanan publik.

**KKP dalam hal ini Pusdatin sampai saat ini masih terus melakukan pengembangan-pengembangan Aplikasi pada Website PPID. Untuk itu dimohon agar Komisi Informasi Pusat (KIP) dapat memberikan Asistensi dan Masukan bagi perbaikan Website PPID.**
13. Sebagai upaya meningkatkan kecepatan pelayanan informasi, KKP menyediakan layanan Call Center. Hal ini sebagai wujud nyata KKP dalam mendukung Keterbukaan Informasi Publik yang disajikan secara Akurat, Cepat, dan Terpercaya, sekaligus untuk mengklarifikasi HOAX.

**Keberadaan Call Center KKP 141 dan 80511411, dihimbau agar unit kerja eselon I dapat memperbaharui dan menyampaikan setiap informasi publik nya kepada pengelola Call Center untuk dapat diakses publik dengan cepat.**

14. Saat ini humas KKP telah menjadi salah satu role model di lingkup kementerian maupun lembaga untuk komunikasi digital. Media sosial KKP harus mampu menjadi pioner keterbukaan informasi dan menjangkau masyarakat luas, agar segala informasi dapat tersampaikan dengan baik;
15. Terakhir, melalui kegiatan Forum Komunikasi Kehumasan ini, galilah informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya untuk dapat memaksimalkan kinerja kehumasan. Mari mencari jawaban dari setiap tantangan, terutama keterbukaan informasi publik di era industri 4.0 ini. Jangan pernah merasa puas, dan jangan lupa untuk bahagia, Kalau boleh mengutip ucapan Ibu Menteri, “Karena bahagia adalah energi”.

Sekian dari saya. Akhirul kalam.

Wassalam.Wr.Wb